



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI MALUKU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERY PURWANTO**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **51405**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.830.319.000**

1. Tanah Seluas 1353 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 216.480.000
2. Tanah Seluas 207 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 33.120.000
3. Tanah Seluas 451 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 47.895.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/150 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.824.000
5. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 112.000.000
6. Bangunan Seluas 650 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL
SENDIRI Rp. 970.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 898.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
110.000.000
2. MOBIL, SUZUKI IGNIS MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
160.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 628.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 5.375.000****D. SURAT BERTAHAP** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 907.236.557**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.641.430.557
III. HUTANG	Rp.	1.645.453.479
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.995.977.078

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.